

3

MODEL EKONOMI BASIS UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nugroho SBM

MILIK PERPUSTAKAAN
EKSTENSI FE UNDIP

Abstract

The Economic Base Model in Macro Economics is used to formulate the regional planning. One of the technique in the Economic Base Model is Location Quotient (LQ) This paper provides theoretical review on merits and demerits of LQ technique. Thereafter, critics and suggestion are invited to final a better approach to design regional planning.

Keywords : *Economic Base Model. Regional Development Planning, Location Quotient.*

Abstrak

Model Ekonomi Basis yang diadopsi dari Model Ekonomi Makro Nasional, dengan segala kekurangannya, merupakan Model yang bisa dipakai sebagai dasar melakukan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu teknik analisis yang biasa dipakai dalam Model Ekonomi Basis adalah *Teknik Location Quotient* atau LQ. Namun banyak pertanyaan dan diskusi tentang Teknik Analisis LQ yang dipaparkan dalam tulisan ini. Karena banyak diskusi dan pertanyaan terhadap Teknik Analisis LQ itulah terbuka bagi ahli-ahli ekonomi regional untuk memperbaiki kekurangannya atau bahkan menciptakan teknik analisis baru yang lebih sempurna.

Kata Kunci : Model Ekonomi Basis, Perencanaan Pembangunan Daerah, Location Quotient

Pendahuluan

Era otonomi daerah yang dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahanan Daerah menuntut pemerintah daerah yaitu pemerintah kota dan kabupaten untuk aktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Pembangunan daerah tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan potensi, kondisi, masalah, serta kebutuhan khas tiap-tiap kabupaten dan kota tersebut.

Agar pembangunan daerah tersebut bisa tercapai secara optimal maka sudah menjadi kesepakatan perlunya perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah akan menghasilkan suatu rencana pembangunan yang baik bila menggunakan suatu model dan teknik perencanaan pembangunan daerah yang baik juga. Dalam perkembangan yang terkini, salah satu kriteria dari model dan teknik perencanaan yang baik adalah dipakainya metoda kuantitatif.

Metode kuantitatif memang bukan satu-satu metode, teknik, atau model perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi seiring dengan tuntutan jaman maka

metode, teknik, dan model perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan kuantitatif dianggap menghasilkan rencana yang lebih baik karena baik hal-hal yang menjadi dasar perencanaan, sasaran, maupun tujuan akhir perencanaan dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini akan lebih menciptakan kepastian dibanding metode, model, dan teknik perencanaan pembangunan daerah yang kualitatif. Salah satu teknik analisis kuantitatif sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah adalah model ekonomi basis.

Pembahasan

a. Model Ekonomi Basis dan Keterbatasannya

Inti dari model ekonomi basis adalah arah dan pertumbuhan suatu daerah akan ditentukan oleh sektor-sektor yang mengeksport produknya ke daerah atau bahkan ke Negara lain. Oleh karena itu seringkali model basis ekonomi disebut juga model basis ekspor.

Model basis ekonomi atau basis ekspor dalam perencanaan pembangunan daerah sebenarnya diambil atau diadopsi dari model ekonomi makro atau model pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti diketahui ada 2 (dua) model pertumbuhan ekonomi nasional secara makro yaitu : pertama, model yang menganggap faktor-faktor dari dalam (internal) sebagai pemacu pertumbuhan dan kedua, model yang menganggap faktor-faktor dari luar (eksternal) sebagai pemacu pertumbuhan.

Model yang menganggap faktor internal sebagai pemacu pertumbuhan memakai alat fungsi produksi dimana pertumbuhan lalu akan dipengaruhi oleh antara lain modal dan sumberdaya manusia yang dimiliki suatu negara. Sedangkan model yang menganggap faktor eksternal sebagai pemacu pertumbuhan, menganggap antara lain kegiatan perdagangan internasional atau hubungan ekonomi internasional sebagai pemacu pertumbuhan suatu negara. Model Basis Ekonomi mengadopsi model pertumbuhan ekonomi makro-nasional yang menganggap bahwa faktor-faktor eksternal seperti perdagangan luar negeri lah yang dapat memacu pertumbuhan.

Adopsi model-model ekonomi makro-nasional ke model perencanaan pembangunan daerah terpaksa dilakukan karena ilmu ekonomi regional yang menjadi induk dari perencanaan daerah masih relatif muda dibanding ilmu ekonomi makro (nasional). Jadi adopsi dilakukan karena model atau teknik yang spesifik dalam ekonomi regional belum ada atau belum berkembang.

Adopsi tersebut menurut Harry W Richardson (1977) sebenarnya mengandung kelemahan karena: (1) Karakteristik ekonomi nasional dan regional atau daerah sangatlah berbeda. Ekonomi nasional misalnya bisa ditutup atau menutup diri dari hubungan ekonomi Negara lain. Akan tetapi ekonomi daerah tidak bisa berbuat demikian. Jadi ekonomi daerah bersifat lebih terbuka daripada ekonomi nasional. (2) biasanya ketersediaan data ekonomi daerah lebih terbatas dan kurang sempurna dibanding data ekonomi nasional. Akibatnya kebutuhan data dalam model ekonomi makro nasional seringkali gagal dipenuhi bila model tersebut diadopsi untuk ekonomi daerah atau regional., (3) ekonomi daerah atau regional mengandung banyak variabel di luar kontrol pemerintah daerah (variabel eksogen). Hal ini disebabkan oleh tingkat keterbukaan daerah yang tinggi dan keterbatasan wewenang pemerintah daerah dibanding pemerintah nasional..

Meskipun memiliki banyak keterbatasan tetapi adopsi model basis ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah dari model pertumbuhan ekonomi makro nasional tetap berguna. Karena seperti telah dikemukakan di depan, metode atau model yang spesifik untuk perencanaan pembangunan daerah belum ada. Jadi seperti kata pepatah "Tidak ada Rotan Akar pun Jadi".

b. Teknik Analisis

Ada beberapa teknik analisis yang biasa dipakai untuk mengidentifikasi sektor basis sebuah kota atau kabupaten. Beberapa teknik analisis itu antara lain :

1. Teknik Arbitrer Sederhana

Menurut teknik ini sektor yang merupakan sektor basis adalah sektor industri atau manufaktur. Sedangkan sektor lain adalah sektor non-basis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hanya sektor industri manufaktur lah yang mampu menghasilkan produk secara massa sehingga mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri sekaligus kebutuhan dari luar daerah tersebut. Di samping itu karena sifat produksi massa tersebut maka dampak terhadap penyerapan kesempatan kerjanya juga lebih besar.

2. Teknik Kuosien lokasi (*Location Quotient*)

Teknik kuosien lokasi yang digunakan untuk menentukan sektor basis ada beberapa macam antara lain:

- a. Kuosien Lokasi atas dasar tenaga kerja per sektor dengan rumus:

$$LQ = \frac{X_{ij} / X_j}{Y_i / Y} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- LQ = Indeks Kuosien Lokasi
- X_{ij} = Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di sektor i di Kabupaten atau Kota j
- X_j = Jumlah Total Tenaga kerja di Kabupaten atau Kota J
- Y_i = Jumlah Tenaga Kerja di sektor i di Propinsi atau daerah acuan lain, misal wilayah pembangunan atau karisidenan
- Y = Jumlah total tenaga kerja di Propinsi atau daerah acuan lain, misal wilayah pembangunan atau karisidenan

- b. Kuosien Lokasi atas dasar PDRB dengan rumus :

$$LQ = \frac{X_{ij} / X_j}{Y_i / Y} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- LQ = Indeks Kuosien Lokasi
- X_{ij} = Nilai PDRB sektor i di Kabupaten atau Kota j
- X_j = Nilai PDRB Total Kabupaten atau Kota J
- Y_i = Nilai PDRB sektor i di Propinsi atau daerah acuan lain, misal wilayah pembangunan atau karisidenan
- Y = Nilai PDRB total tenaga kerja di Propinsi atau daerah acuan lain, misal wilayah pembangunan atau karisidenan

Justifikasi untuk kuosien lokasi baik atas dasar tenaga kerja maupun PDRB adalah :

- Jika LQ > 1 maka suatu sektor dikatakan sektor basis

- Jika $LQ = 1$ maka dikatakan suatu sektor mendekati sebagai sektor basis. Beberapa penulis mengkategorikan sektor yang LQ nya = 1 adalah sektor basis
 - Jika $LQ < 1$ maka suatu sektor bukan merupakan sektor basis
- c. Kuosien Lokasi Atas Dasar Komoditi atau Produksi Suatu Wilayah
- Kuosien jenis ini memang tidak dipakai untuk menentukan sektor basis tetapi biasanya digunakan untuk menentukan apakah komoditi yang merupakan hasil suatu wilayah merupakan komoditi unggulan atau tidak (lihat misalnya Tri Wahyu, Dkk, 2002). Namun untuk melengkapi pengetahuan ada baiknya dijelaskan di sini. Adapun rumus yang dipakai adalah

$$LQ = \frac{X_{ij} / X_j}{Y_i / Y} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

- LQ = Indeks Kuosien Lokasi
- X_{ij} = Nilai produksi komoditi i di suatu sektor/sub sektor di Kabupaten atau Kota
- X_j = Nilai produksi Total semua komoditi di suatu sektor/sub sektor Kabupaten atau Kota J
- Y_i = Nilai produksi komoditi i di suatu sektor/sub sektor di Propinsi atau daerah acuan lain, misal wilayah pembangunan atau karisidenan

Justifikasi untuk kuosien lokasi baik atas dasar nilai produksi suatu komoditi adalah :

- Jika $LQ > 1$ maka komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan suatu wilayah
- Jika $LQ = 1$ maka dikatakan suatu komoditi mendekati sebagai komoditi unggulan suatu wilayah. Beberapa penulis mengkategorikan komoditi yang LQ nya = 1 adalah komoditi unggulan
- Jika $LQ < 1$ maka suatu komoditi bukan merupakan komoditi unggulan

Kembali pada adopsi model ekonomi makro nasional untuk perencanaan pembangunan daerah, dalam teknik analisis LQ ini akan tampak bahwa ternyata Indeks LQ ini mengadopsi dari ***Indeks Revealed Comparative Advantage*** (RCA) untuk menentukan komoditi dimana suatu negara itu mempunyai keunggulan komparatif dibanding negara-negara lain dalam teori perdagangan internasional . Adapun rumus dari Rumus ***Indeks Revealed Comparative Advantage*** (RCA) adalah sebagai berikut (lihat Marie Pangestu, dkk, 1996) :

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij} / X_j}{W_j / W} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- X_{ij} = Nilai ekspor komoditi j dari negara i
- X_j = Nilai ekspor total semua komoditi dari negara i
- W_j = Nilai ekspor komoditi j di dunia atau wilayah yang lebih luas dari negara i (misalnya satu kawasan perdagangan bebas dimana negara i menjadi anggota)
- W = Nilai ekspor total semua komoditi di dunia atau wilayah yang lebih luas dari negara i (misalnya satu kawasan perdagangan bebas dimana negara i menjadi anggota)

Justifikasi dari nilai Indeks RCA adalah sebagai berikut:

- RCA $ij > 1$ berarti komoditi j di negara i mempunyai keunggulan komparatif sebagai komoditi ekspor dibandingkan negara-negara lain di dunia atau di kawasan acuan lain (misal di kawasan perdagangan bebas di mana negara i menjadi anggota)
- RCA $ij = 1$ berarti komoditi j di negara i mendekati komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif sebagai komoditi ekspor dibandingkan negara-negara lain di dunia atau di kawasan acuan lain (misal di kawasan perdagangan bebas di mana negara i menjadi anggota)
- RCA $ij < 1$ berarti komoditi j di negara i tidak mempunyai keunggulan komparatif sebagai komoditi ekspor dibandingkan negara-negara lain di dunia atau di kawasan acuan lain (misal di kawasan perdagangan bebas di mana negara i menjadi anggota)

3. Teknik Kebutuhan Minimum

Merupakan modifikasi dari teknik *Location Quotient* (LQ) dengan menggunakan distribusi minimum dan bukannya distribusi rata-rata dari penyerapan tenaga kerja yang diperlukan untuk menopang suatu sektor di suatu daerah. Untuk suatu daerah (Kabupaten atau Kota) yang pertama-tama dihitung adalah persentase tenaga kerja daerah yang bekerja di setiap sektor. Persentase terkecil digunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi sektor tersebut. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas. Suatu sektor yang menyerap tenaga kerja di atas persentase penyerapan tenaga kerja minimum dianggap sebagai sektor basis. Dengan metode seperti itu maka sering dikatakan bahwa Teknik Kebutuhan Minimum ini lebih arbitrer (acak) dibanding Teknik *Location Quotient*

c. Beberapa Diskusi Tentang Teknik Location Quotient

Dibanding dua teknik yang lain untuk mengetahui sektor basis di suatu daerah, maka Teknik LQ yang paling sering digunakan. Alasannya karena teknik LQ lebih pasti atau tidak acak (arbitrer) dibanding dua teknik yang lain. Akan tetapi ada beberapa topik diskusi tentang Teknik LQ ini.

Pertama, mengenai asumsi yang dipakai dalam teknik ini. Ada 2 (dua) asumsi penting dalam Teknik LQ yaitu: pertama, pola permintaan penduduk daerah yang dihitung LQ nya sama dengan pola permintaan penduduk daerah yang lebih luas atau daerah acuan; dan kedua, permintaan dari suatu daerah akan dipenuhi dari daerah itu sendiri,

baru kekurangannya akan diimpor dari daerah lain.

Banyak ahli (lihat misalnya Richardson, 1977; Glasson, 1990; Sadono Sukirno, 1976; dan Suwardjoko Warpani, 1984) berpandangan bahwa pada kenyataannya kedua asumsi tersebut sulit dipenuhi. Asumsi keseragaman pola permintaan antara daerah yang dihitung dengan pola permintaan daerah acuan sering tidak terbukti dalam praktek karena perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan misalnya: pendapatan, harga barang, dan selera. Asumsi kedua pun sangat jarang dipenuhi dalam praktek. Kebutuhan penduduk suatu daerah seringkali langsung dipenuhi dari daerah lain karena di daerahnya sendiri tidak ada produksi untuk produk atau jasa yang dimaksud. Tidak adanya produksi produk atau jasa yang dimaksud karena tidak adanya keunggulan komparatif di daerah itu bagi produksi produk atau jasa yang dimaksud. Demikian juga ada kemungkinan produksi suatu daerah tidak dikonsumsi oleh penduduknya sendiri melainkan oleh penduduk asing.

Diskusi kedua, menyangkut mana yang sebaiknya digunakan apakah Teknik LQ yang dihitung berdasar tenaga kerja sektoral ataukah LQ berdasarkan PDRB. Banyak ahli (lihat misalnya Richardson, 1977; Glasson, 1990; Sadono Sukirno, 1976; dan Suwardjoko Warpani, 1984) dalam hal ini sepakat bahwa penggunaan teknik LQ atas dasar tenaga kerja sektoral lebih baik dibandingkan teknik LQ yang dihitung berdasar PDRB. Seperti diketahui PDRB hanya menunjukkan nilai kegiatan produksi di suatu daerah. Nilai produksi tersebut seringkali tidak mencerminkan apakah kegiatan produksi itu mempunyai dampak positif bagi perekonomian daerah itu. Seringkali kegiatan produksi di suatu daerah tidak terkait dengan ekonomi daerah itu karena memakai tenaga kerja, peralatan dan bahan baku dari luar daerah atau bahkan dari negara lain. Banyak contoh kasus seperti itu di daerah-daerah di Indonesia. Misalnya: "PT Freeport" di Papua yang memakai tenaga kerja asing dan peralatan dari luar negeri. Akibatnya nilai PDRB Papua tinggi, Perusahaan Free Port

Kaya, tetapi penduduk asli Papua tetap miskin. Oleh karena itu LQ yang dihitung berdasarkan tenaga kerja lebih mencerminkan suatu sektor sebagai sektor yang benar-benar basis atau menjadi tumpuan daerah tersebut.

Diskusi ketiga, menyangkut perhitungan LQ yang seringkali hanya pada satu titik waktu pengamatan saja. Bagaimana kalau lama kelamaan suatu sektor terus merosot kinerjanya sehingga tidak menjadi basis lagi? Untuk menjawab pertanyaan ini memang idealnya LQ tidak dihitung hanya pada satu titik waktu pengamatan saja, melainkan selama rentang waktu (periode) tertentu. Dengan cara demikian akan diketahui mana sektor yang merupakan sektor basis yang sejati artinya bisa bertahan pada kurun waktu tertentu.

Diskusi keempat, menyangkut pertanyaan mengapa yang dipilih untuk dijadikan sektor pemacu pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor yang LQ nya lebih besar dari satu atau merupakan sektor basis? Pertanyaan itu timbul karena konsekuensi dari dipilihnya suatu sektor sebagai sektor basis dalam perencanaan pembangunan daerah adalah biasanya sektor itu akan diperlakukan istimewa misalnya mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Bukankah ini suatu langkah yang keliru, sebab suatu sektor yang sudah maju tidak perlu campurtangan pemerintah yang terlalu besar. Campurtangan pemerintah antara lain lewat alokasi anggaran yang besar justru dibutuhkan oleh sektor-sektor yang bukan sektor basis (atau yang LQ nya lebih kecil dari 1). Terhadap pertanyaan ini dapat dikemukakan jawaban bahwa secara tersembunyi atau implisit, asumsi lain yang melandasi teknik analisis LQ adalah bahwa filosofi pembangunan yang dianut adalah "*Trickle Down Effect*" artinya untuk efisiensi pemerintah daerah akan mengalokasikan dananya pada sektor yang kuat dengan harapan sektor yang kuat itu akan menularkan pertumbuhannya pada sektor yang kurang kuat. Kalau pemerintah daerah kurang yakin

bahwa filosofi “*Trickle Down Effect*” ini berjalan maka memang sektor-sektor non basis lah yang harus lebih diutamakan.

Diskusi kelima, menyangkut masih terlalu globalnya hasil dari analisis menggunakan teknik LQ. Misalnya sudah ditemukan bahwa sektor basis di suatu daerah adalah sektor pertanian. Lalu timbul pertanyaan sub sektor apa atau pada komoditi apa? Oleh karena itu para ahli ekonomi regional sepakat bahwa teknik analisis LQ hanya teknik analisis awal. Ia harus dilengkapi dengan alat analisis lain yang bisa lebih mendetailkan analisis, misalnya dengan analisis deskriptif kualitatif yang tajam.

Diskusi keenam atau terakhir meyangkut hal-hal kualitatif yang tidak tercermin dalam alat analisis kuantitatif seperti LQ. Atau dengan kata lain perlu dijelaskan lebih detil hal-hal “di balik angka LQ” yang telah dihitung. Misalnya saja apa faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang membuat suatu sektor menjadi sektor basis di suatu daerah? Lagi-lagi di sini dibutuhkan alat analisis deskriptif kualitatif. jadi misalnya bila ditemukan sektor basis Kota Semarang adalah sektor perdagangan maka bisa ditelusur dari aspek historis mengapa demikian. Jawabannya antara lain karena sejak dulu Kota Semarang memang merupakan Kota pusat perdagangan sehingga secara historis kultural memang sektor perdagangan layak menjadi sektor basis Kota Semarang.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Demikianlah beberapa hal yang bisa dikemukakan terkait dengan Model Basis Ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah dengan teknik analisis LQ yang lebih ditonjolkan. Memang banyak sekali kelemahan dalam model basis ekonomi maupun teknik analisis LQ seperti telah diuraikan di atas.

Akan tetapi di tengah masih langkanya model dan teknik analisis yang spesifik untuk ilmu ekonomi regional pada umumnya dan perencanaan pembangunan daerah pada khususnya, penggunaan Model Basis Ekonomi dan Teknik Analisis LQ masih bisa dipakai dengan segala keterbatasannya.

Saran

Karena banyak keterbatasan dari teknik LQ seperti telah dikemukakan di dalam tulisan ini maka masih terbuka lebar kesempatan bagi ahli-ahli ekonomi regional untuk memperbaiki model dan teknik ini ataupun menemukan model dan teknik lain yang lebih sempurna.

Perbaikan itu misalnya menyangkut data yang menjadi dasar bagi penghitungan LQ yang selama ini dikenal yang sudah dibahas dalam artikel ini yaitu PDRB, tenaga kerja, dan nilai produksi suatu komoditi di suatu wilayah. Perbaikan lain menyangkut bagaimana melengkapi metode LQ ini dengan metode lain sehingga sektor basis dari hasil analisis LQ benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrawi Sanusi, 2000, *Pengantar Perencanaan Pembangunan*, LPFE UI, Jakarta.
- Glasson, John, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan oleh Paul Sitohang, Penerbit LPFE UI, Jakarta.
- Iwan Jaya Azis, 1993, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE UI, Jakarta
- Marie Pangestu, dkk, 1996, *Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, CSIS, Jakarta.
- Richardson, Harry W, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, LPFE UI, Jakarta
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Robinson Tarigan, 2004, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Sadono Sukirno, 1976, *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LPFE UI, Jakarta
- Sugeng Budiharsono, 2000, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramitha, Jakarta. ✓
- Suwardjoko Warpani, 1984, *Analisa Kota dan Daerah*, Penerbit ITB, Bandung
- Tri Wahyu R, dkk, 2002, *Profil Investasi Kabupaten Blora*, Kerjasama Bappeda Blora dengan Fakultas Ekonomi Undip. (Tidak dipublikasikan)

8 P
*9, 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9

